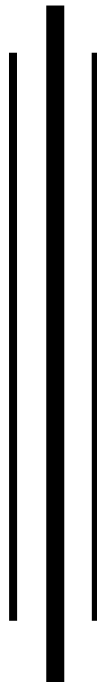




**RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 28 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 16 Agustus 2019



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 56 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia seutuhnya sudah seharusnya memiliki atau berada pada suatu kondisi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu menempatkan manusia sebagai yang utama dalam pembangunan (subjek), dengan implikasi bahwa pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator terhadap adanya peluang dalam membangkitkan kreativitas manusia dan masyarakat guna mewujudkan *Self Sustaining Capacity* yaitu dengan menerapkan model perencanaan partisipatif (tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Berawal dari perencanaan partisipatif tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan urusan wajib, artinya bahwa penyelenggaraan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus dilaksanakan sekaligus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bertugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, sebagai implementasi tugas-tugas tersebut, salah satunya adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Malang Tahun 2020. Proses penyusunan Rencana Kerja, diawali dengan penghimpunan berbagai usulan masyarakat melalui media Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Setiap usulan masyarakat, selanjutnya dijadikan dasar kajian dan diposisikan sebagai prioritas kebijakan dalam perumusan Rencana Kerja pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Tahapan penyusunan antara lain sebelum perumusan Rencana Kerja, diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja. Tim tersebut bertugas dalam merumuskan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja, hingga menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020. Proses penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara bertahap dan intensif melalui media rapat Tim.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, didasarkan pada:

1. Visi dan Misi Kabupaten Malang Madep Manteb Manetep;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, sekaligus sebagai bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Keberhasilan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai andil dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas, dengan harapan

bahwa setiap keluarga mampu merencanakan kehidupannya agar menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yaitu "Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia".

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yaitu masih rendahnya kualitas perencanaan Keluarga Berencana, masih tingginya perkawinan usia di bawah 20 (duapuluh) tahun, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dan masih lemahnya pembinaan ketahanan keluarga. Guna menjawab permasalahan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk mengatasinya yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya *eksisting* secara optimal, dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien dan berkelanjutan (*sustainable*), diikuti dengan peningkatan kemudahan akses program, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Namun perlu disadari, bahwa jejaring operasional lini lapangan pada kenyataannya belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara menyeluruh. Menyikapi kondisi tersebut, perlu dilakukan penguatan jejaringan pelayanan Keluarga Berencana, dengan melibatkan unsur eksekutif, legislatif, Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat, Tentara nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, profesi dan komponen masyarakat sebagai wujud pendekatan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di berbagai segmen sasaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Malang Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

26. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/737/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/669/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/172/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, serta analisa capaian kinerja Tahun 2018. Pada sisi lain, Rencana Kerja Tahun 2020 juga memuat program dan kegiatan Tahun 2020, sekaligus memuat sasaran yang ingin dicapai Tahun 2020 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan isu-isu strategis, yang diperkirakan akan berdampak pada penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana berkualitas, yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.
3. Mengidentifikasi ketersediaan sumberdaya, yang akan dijadikan sebagai kekuatan dalam pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.
4. Memberikan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga antara pemerintah pusat dan daerah, antar waktu maupun antar program.
2. Terjalannya keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, guna tercapainya sasaran lima tahun ke depan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didasarkan pada kemampuan dan prioritas pembangunan.
3. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2020.
4. Tersedianya acuan pelaksanaan bagi para pelaksana dan pengelola pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- l) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c) Pengadaan Mebeleur;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK);
- g) Pembangunan Gedung Kantor (DAK).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Pengembangan Data dan Informasi.
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - a) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data;
 - b) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR);
 - c) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS);
 - d) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan;
 - e) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - f) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK);
 - g) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK);
 - h) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK).
7. Program Pelayanan Keluarga Berencana
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi;
 - b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR);
 - c) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi;
 - d) Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - e) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK);
 - f) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK).
8. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
Terdiri dari kegiatan-kegiatan:
 - a) Bina Ketahanan Remaja;
 - b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS);
 - d) Bina Ketahanan Remaja (DAK);
 - e) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK);
 - f) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK).

9. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

Terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
- b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa;
- c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana;
- d) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK);
- e) Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK);
- f) Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK).

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2019 (TAHUN BERJALAN)
PD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan/BidangUrusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2016-2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2018			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
2.208.13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.208.13.01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Operasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	* 100,00%
2.208.13.01.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12.000 buah	7.023 buah	4.000 buah	4.494 buah	112,35%	4.000 buah	15.517 buah	* 129,31%
2.208.13.01.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	* 33,33%
2.208.13.01.03	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	36 ob	24 ob	12 ob	12 ob	100,00%	12 ob	12 ob	* 33,33%
2.208.13.01.04	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4 Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 ob	24 ob	12 ob	12 ob	100,00%	12 ob	12 ob	* 33,33%
2.208.13.01.05	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	96 jenis	64 jenis	32 jenis	32 jenis	100,00%	32 jenis	32 jenis	* 33,33%
2.208.13.01.06	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	18 jenis	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00%	6 jenis	6 jenis	* 33,33%
2.208.13.01.07	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 jenis	20 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00%	10 jenis	10 jenis	* 33,33%
2.208.13.01.08	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	9 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	3 jenis	3 jenis	* 33,33%
2.208.13.01.09	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	7.200 hok	2.552 hok	2.316 hok	2.316 hok	100,00%	2.400 hok	7.268 hok	* 100,94%
2.208.13.01.10	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	375 hok	115 hok	100 hok	100 hok	100,00%	125 hok	340 hok	* 90,67%
2.208.13.01.11	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	480 hok	227 hok	153 hok	153 hok	100,00%	160 hok	540 hok	* 112,50%
2.208.13.01.12	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	* 33,33%
2.208.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemenuhan Sarana dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	* 100,00%
2.208.13.02.01	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	9 jenis	6 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00%	3 jenis	3 jenis	* 33,33%
2.208.13.02.02	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 jenis	14 jenis	7 jenis	7 jenis	100,00%	7 jenis	7 jenis	* 33,33%
2.208.13.02.03	3 Pengadaan Mebeleur	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	6 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00%	2 jenis	2 jenis	* 33,33%
2.208.13.02.04	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	2 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00%	1 gdg	1 gdg	* 100,00%
2.208.13.02.05	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149 unit	14 unit	9 unit	9 unit	100,00%	149 unit	149 unit	* 100,00%
2.208.13.02.06	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	33 gedung	-	29 gedung	29 gedung	100,00%	29 gedung	29 gedung	* 87,88%

Kode	Urusan/BidangUrusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2016-2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2018			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
2.208.13.02.07	7 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	7 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	10 unit	9 unit	-	-	-	4 unit	13 unit	130,00%
2.208.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.208.13.03.01	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	150 stel	139 stel	50 stel	50 stel	100,00%	50 stel	239 stel	159,33%
2.208.13.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.208.13.04.01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	300 orang	90 orang	95 orang	95 orang	100,00%	100 orang	285 orang	95,00%
2.208.13.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.208.13.05.01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 buku	8 buku	4 buku	4 buku	100,00%	4 buku	16 buku	133,33%
2.208.13.05.02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semester	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	3 buku	2 buku	1 buku	1 buku	100,00%	1 buku	4 buku	133,33%
2.208.13.05.03	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Ta	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	2 buku	1 buku	1 buku	100,00%	1 buku	4 buku	133,33%
2.208.13.06	Program Data/Informasi Pengendalian	Persentase data keluarga dan KB di	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.208.13.06.01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1.170 dokumen	780 dokumen	390 dokumen	390 dokumen	100,00%	390 dokumen	1.560 dokumen	133,33%
2.208.13.06.02	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	133,33%
2.208.13.06.03	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	4 dokumen	133,33%
2.208.13.06.04	4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	4 Jumlah dokumen parameter	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
2.208.13.06.05	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
2.208.13.06.06	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1.170 dokumen	-	390 dokumen	390 dokumen	100,00%	390 dokumen	780 dokumen	66,67%
2.208.13.06.07	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	7 Jumlah dokumen parameter	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
2.208.13.06.08	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
2.208.13.07	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	40,00 %	32,58 %	36,41 %	32,75 %	89,95%	38,20 %	38,20 %	95,50%
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB	100 %	50,47 %	60,00 %	55,55 %	92,58%	80,00 %	80,00 %	80,00%
2.208.13.07.01	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	1 Jumlah peserta KB Aktif	343.625 akseptor	805.878 akseptor	301.874 aks	384.628 akseptor	127,41%	315.381 akseptor	315.381 akseptor	91,78%
2.208.13.07.02	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3.800 orang	2.678 orag	2.280 orang	2.111 orag	92,59%	3.040 orang	3.040 orang	80,00%
2.208.13.07.03	3 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	3 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	-	96 klinik	91 klinik	94,79%	96 klinik	96 klinik	100,00%
2.208.13.07.04	4 Pembinaan Kesertaan ber KB	4 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	34.181 PUS	109.368 PUS	44.994 PUS	56.168 PUS	124,83%	39.637 PUS	39.637 PUS	115,96%
2.208.13.07.05	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3.800 orang	1.157 orang	2.280 orang	2.111 orang	92,59%	3.040 orang	50 Klp	1,32%
2.208.13.07.06	4 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	4 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	87 klinik	96 klinik	91 klinik	94,79%	96 klinik	96 klinik	100,00%

Kode	Urusan/Bidang/Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2016-2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2018			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2019		
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)	
2.208.13.08	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKR Paripurna	62,26 %	6,19 %	45,28 %	45,28 %	100%	53,46 %	53,46 %	*	85,87%
		Persentase PUS anggota kelompok BKB	88,15 %	83,80 %	87,00 %	84,74 %	97,40%	87,10 %	87,10 %	*	98,81%
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47,47 %	38,38 %	44,44 %	35,78 %	80,51%	45,45 %	45,45 %	*	95,74%
2.208.13.08.01	1 Bina Ketahanan Remaja	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	6 kelompok	19 kelompok	6 kelompok	31,58%	21 kelompok	21 kelompok	*	84,00%
2.208.13.08.02	2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.866 akseptor	40.564 akseptor	37.262 akseptor	39.012 akseptor	104,70%	37.796 akseptor	37.796 akseptor	*	97,25%
2.208.13.08.03	3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	38 kelompok	44 kelompok	39 kelompok	88,64%	45 kelompok	45 kelompok	*	95,74%
2.208.13.08.04	4 Bina Ketahanan Remaja (DAK)	4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	6 kelompok	19 kelompok	6 kelompok	31,58%	21 kelompok	21 kelompok	*	84,00%
2.208.13.08.05	5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.866 akseptor	40.564 akseptor	37.262 akseptor	39.012 akseptor	104,70%	37.796 akseptor	37.796 akseptor	*	97,25%
2.208.13.08.06	6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	38 kelompok	44 kelompok	39 kelompok	88,64%	45 kelompok	45 kelompok	*	95,74%
2.208.13.09	Program Penyuluhan dan Penggerakan	Persentase PPKBD Mandiri	69,49 %	38,72 %	46,41 %	39,23 %	84,53%	54,10 %	54,10 %	*	77,85%
2.208.13.09.01	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1 Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	254 orang	181 orang	153 orang	84,53%	211 orang	211 orang	*	77,86%
2.208.13.09.02	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	285 orang	290 orang	290 orang	100,00%	295 orang	295 orang	*	96,72%
2.208.13.09.03	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	-	390 orang	390 orang	100,00%	390 orang	390 orang	*	100,00%
2.208.13.09.04	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	4 Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	3.406 ok	181 orang	153 orang	84,53%	211 orang	211 orang	*	77,86%
2.208.13.09.05	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	993 orang	290 orang	290 orang	100,00%	295 orang	295 orang	*	96,72%
2.208.13.09.06	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	6 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	-	390 orang	390 orang	100,00%	390 orang	390 orang	*	100,00%

Keterangan : (*) Perkiraan realisasi didasarkan pada target hasil akhir tahun berjalan

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa capaian kinerja program/kegiatan hingga Tahun 2018 diukur berdasarkan target akhir tahun, yang didasarkan pada target Rencana Kerja Tahun 2018.

Terdapat beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2018 yang belum terpenuhi, yaitu:

- 1) Program Pelayanan Keluarga Berencana (indikator Persentase Peserta KB MKJP : Target = 36,41%; Realisasi = 32,75%; Capaian = 89,95% dan Persentase PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR) : Target = 60,00%; Realisasi = 55,55%; Capaian = 92,58%)
 - a) Kegiatan Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (indikator Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)) : Target = 2.280 orang; Realisasi = 2.111 orang; Capaian = 92,59%).
 - b) Kegiatan Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (indikator Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai : Target = 96 klinik; Realisasi = 91 klinik; Capaian = 94,79%).
- 2) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (indikator Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB : Target = 87,00%; Realisasi = 84,74%; Capaian = 97,40% dan Persentase Kelompok UPPKS Mandiri : Target = 44,44%; Realisasi = 38,78%; Capaian= 80,51%).
 - a) Kegiatan Bina Ketahanan Remaja (indikator Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar : Target = 19 klp; Realisasi = 6 klp; Capaian = 31,58%).
 - b) Kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
 - c) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (indikator Jumlah kelompok UPPKS Mandiri : Tagret = 44 klp; Realisasi = 39 klp; Capaian= 88,64%).
- 3) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana (indikator Persentase PPKBD Mandiri : Target = 46,41%; Realisasi = 39,23%; Capaian= 84,53%).
 - a) Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (indikator Jumlah PPKBD Mandiri : Tagret = 181 orang; Realisasi = 153 orang; Capaian = 84,53%).

Berdasarkan pada indikator program/kegiatan yang tidak terpenuhi tersebut di atas, dapat berdampak pada:

1) Program pelayanan keluarga berencana:

- Dengan tidak tercapainya indikator Persentase Peserta KB MKJP dan Persentase PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR), akan berdampak pada kualitas kepesertaan KB, sehingga rentan terhadap *Drop Out* (DO) KB. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi fluktuasi kepesertaan KB, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR).

2) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga:

- Tidak tercapainya indikator persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB, akan berdampak menurunnya ketahanan keluarga balita akibat adanya ketidak seimbangan pemenuhan kebutuhan materiil dan spirituil.
- Pada kegiatan Kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera dengan indikator Persentase Kelompok UPPKS Mandiri tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut, akan berdampak lemahnya pembinaan kegiatan ekonomi produktif pada keluarga, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera, karena tidak adanya wadah kegiatan ekonomi produktif yang mumpuni di masyarakat, sehingga akan menimbulkan lemahnya ketahanan ekonomi keluarga.

3) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana:

- Tidak tercapainya indikator Persentase PPKBD Mandiri, akan berdampak pada lemahnya kapasitas Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKB di masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Institusi Masyarakat Perdesaan merupakan ujung tombak penggerakan Program KKB.

Sebagai tindak lanjut untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya-upaya, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pembinaan kualitas kepesertaan ber KB.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok BKB melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, dengan mengembangkan kelompok BKB Integrasi.

- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS melalui pembinaan yang intensif dan berkesinambungan, dengan bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait.
- 4) Peningkatkan partisipasi masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA) dalam pembangunan KKBPK;
- 5) Mengajukan tambahan tenaga lini lapangan (PKB/PLKB).
- 6) Mengajukan penyediaan anggaran yang proporsional, atau dengan menggeser anggaran pada beberapa kegiatan yang telah melampaui target pada kegiatan yang belum mencapai target.

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2018 yang sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) Program/kegiatan Rutin secara keseluruhan indikator kinerja dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik, program tersebut terdapat pada: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 2) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk dapat terpenuhi dengan baik, termasuk pada setiap kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain : 1) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data; 2) Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR); 3) Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS); 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan; 5) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; 6) Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK); 7) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK); 8) Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK).
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dapat terpenuhi dengan baik (khususnya pada indikator Persentase BKR Paripurna : target = 45,28%; realisasi = 45,28%; capaian=100%), yang didukung oleh kegiatan Bina Ketahanan Remaja.
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana dapat terpenuhi dengan baik (khususnya pada indikator Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik : target = 290 orang; realisasi = 290 orang; capaian=100% dan Jumlah PPKBD Aktif : target = 390 orang; realisasi = 390 orang; capaian=100%), yang didukung

oleh kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi Massa dan Penyuluhan Program Keluarga Berencana.

Beberapa capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2018 yang sudah terpenuhi melampaui target, yaitu:

- 1) Indikator Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Indikator Jumlah peserta KB Aktif dan Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB) pada Program Pelayanan Keluarga Berencana.
- 3) Indikator Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB pada kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dalam Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, sehingga berdasarkan analisa perkiraan capaian indikator kinerja program/kegiatan masih belum sesuai dengan harapan target Renstra. Namun, optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan harus ditingkatkan, dengan harapan agar target capaian pada tahun-tahun sebelumnya juga bisa terpenuhi pada tahun berjalan.

Untuk perhitungan capaian indikator kinerja didasarkan pada hasil perbandingan realisasi capaian program kegiatan terhadap target program/kegiatan renja Tahun 2018. Metode perhitungan pada realisasi capaian program kegiatan, didasarkan pada hasil penjumlahan realisasi capaian awal masa berlakunya Renstra (Tahun 2016) hingga tahun berjalan 2018 (perkiraan capaian), hal ini dikarenakan semua indikator tidak mengalami perubahan (sama).

Hasil evaluasi program/kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra hingga Tahun 2018, dapat diuraikan secara terperinci pada tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja program dan indicator kinerja kegiatan, yaitu:

1. Sejak Tahun 2019, indikator kinerja utama terdiri dari 3 (Tiga) indikator, antara lain:
 - 1) Persentase Peserta KB Aktif;
 - 2) Persentase Kampung KB Aktif;
 - 3) Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar.
2. Indikator Program/kegiatan, terdiri dari:
 - 1) Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)
 - a. Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah);
 - b. Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan);
 - c. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB);
 - d. Jumlah petugas kebersihan (OB);
 - e. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis);
 - f. Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis);
 - g. Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis);
 - h. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis);
 - i. Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK);
 - j. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK);
 - k. Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK); dan
 - l. Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan).
 - 2) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
 - a. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis);
 - b. Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis);
 - c. Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis);

- d. Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis);
 - e. Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit);
 - f. Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis); dan
 - g. Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit).
- 3) Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
 - a. Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel).
 - 4) Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)
 - a. Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang).
 - 5) Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)
 - a. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku);
 - b. Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku); dan
 - c. Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku).
 - 6) Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan
 - a. Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan;
 - b. Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR);
 - c. Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
 - d. Jumlah dokumen parameter; dan
 - e. Jumlah dokumen mutasi keluarga.
 - 7) Persentase Peserta KB MKJP dan Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)
 - a. Jumlah peserta KB Aktif;
 - b. Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR);
 - c. Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai; dan
 - d. Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB).
 - 8) Persentase BKR Paripurna;
 - Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB;
 - Persentase Kelompok UPPKS Mandiri.
 - a. Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar;
 - b. Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB;
 - c. Jumlah kelompok UPPKS Mandiri.

9) Persentase PPKBD Mandiri

- a. Jumlah PPKBD Mandiri;
- b. Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik;
- c. Jumlah PPKBD Aktif.

Beberapa indikator tersebut diukur berdasarkan indikator target daerah, yang mengacu pada perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa terdapat indikator IKU yang telah mencapai target Tahun 2019, yaitu Persentase Peserta KB Aktif dengan target Renja Tahun 2019 sebesar 68,00%, tercapai sebesar 74,17%. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih perlu adanya peningkatan intensitas dan kualitas pembinaan pada beberapa program/kegiatan pembangunan KKBPK di Kabupaten Malang.

Indikator IKU Tahun 2019 yang belum tercapai, adalah indikator Persentase Kampung KB Aktif dan Persentase kelompok PIK Remaja Tegar. Penyebab belum tercapainya indikator tersebut karena pelaksanaan program/kegiatan masih dalam tahun berjalan.

Tabel 2.2
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN MALANG**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indikator Eselon II, terdiri :											
	1 Persentase Peserta KB Aktif		69,84%	67,04%	68,00%	68,94%	69,84%	75,62%	74,17%	68,94%	69,84%	Sudah Tercapai
	2 Persentase Kampung KB Aktif		90,00%	10,00%	25,00%	50,00%	90,00%	12,50%	14,00%	50,00%	90,00%	Belum Tercapai
	3 Persentase kelompok PIK Remaja Tegar		26,04%	6,25%	21,88%	23,96%	26,04%	6,06%	5,17%	23,96%	26,04%	Belum Tercapai
2	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	15,87%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			4.000 buah	4.000 buah	4.000 buah	4.000 buah	4.494 buah	893 buah	4.000 buah	4.000 buah	Belum Tercapai
	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3 bulan	12 bulan	12 bulan	Belum Tercapai
	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	7 ob	12 ob	12 ob	Belum Tercapai
	4 Jumlah petugas kebersihan (OB)			12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	12 ob	-	12 ob	12 ob	-
	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	8 jenis	32 jenis	32 jenis	Belum Tercapai
	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	1 jenis	6 jenis	6 jenis	Belum Tercapai
	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	2 jenis	10 jenis	10 jenis	Belum Tercapai
	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1 jenis	3 jenis	3 jenis	Belum Tercapai
	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			2.316 hok	2.400 hok	2.400 hok	2.400 hok	2.316 hok	240 hok	2.400 hok	2.400 hok	Belum Tercapai
	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			100 hok	125 hok	125 hok	125 hok	100 hok	41 hok	125 hok	125 hok	Belum Tercapai
	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			153 hok	160 hok	160 hok	160 hok	153 hok	20 hok	160 hok	160 hok	Belum Tercapai
	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	Belum Tercapai
3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang			100%	100%	100%	100%	100%	0,63%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			1 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1 jenis	0 jenis	3 jenis	3 jenis	Belum Tercapai
	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	0 jenis	7 jenis	7 jenis	Belum Tercapai
	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	0 jenis	2 jenis	2 jenis	Belum Tercapai
	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	Sudah Tercapai
	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			9 unit	149 unit	149 unit	149 unit	9 unit	13 unit	149 unit	149 unit	Belum Tercapai
	6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)			29 gedung	29 gedung	29 gedung	33 gedung	29 gedung	0 unit	29 gedung	33 gedung	Belum Tercapai
	7 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)			-	6 unit	-	4 unit	-	0 unit	-	4 unit	Belum Tercapai

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKU	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)			50 stel	50 stel	50 stel	50 stel	50 stel	0 stel	50 stel	50 stel	Belum Tercapai
5	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat			100%	100%	100%	100%	100,00%	0,00%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			95 org	100 org	100 org	100 org	95 org	0 org	100 org	100 org	Belum Tercapai
6	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100,00%	0,00%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	0 buku	4 buku	4 buku	Belum Tercapai
	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)			1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	0 buku	1 buku	1 buku	Belum Tercapai
	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	0 buku	1 buku	1 buku	Belum Tercapai
7	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan			100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan			390 dok	390 dok	390 dok	390 dok	390 dok	0 dok	390 dok	390 dok	Belum Tercapai
	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
	4 Jumlah dokumen parameter			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	Belum Tercapai
8	Persentase Peserta KB MKJP			34,61%	38,20%	40,00%	40,00%	32,75%	32,84%	40,00%	40,00%	Belum Tercapai
	Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program)			60,00%	80,00%	89,47%	100%	55,55%	61,95%	89,47%	100%	Belum Tercapai
	1 Jumlah peserta KB Aktif			301.874 aks	315.381 aks	329.294 aks	343.625 aks	384.628 aks	373.598 aks	329.294 aks	343.625 aks	Sudah Tercapai
	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)			2.280 orang	3.040 orang	3.400 orang	3.800 orang	2.111 org	2.354 orang	3.400 orang	3.800 orang	Belum Tercapai
	3 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai			96 klinik	96 klinik	96 klinik	96 klinik	91 klinik	35 klinik	96 klinik	96 klinik	Belum Tercapai
	4 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)			44.994 PUS	39.637 PUS	36.979 PUS	34.181 PUS	56.168 PUS	58.645 PUS	36.979 PUS	34.181 PUS	Belum Tercapai
9	Persentase BKR Paripurna			45,28%	53,46%	54,72%	62,26%	45,28%	45,28%	54,72%	62,26%	Belum Tercapai
	Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB			87,00%	87,10%	88,00%	88,15%	84,74%	83,80%	88,00%	88,15%	Belum Tercapai
	Persentase Kelompok UPPKS Mandiri			44,44%	45,45%	46,46%	47,47%	35,78%	29,55%	46,46%	47,47%	Belum Tercapai
	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar			19 klp	21 klp	23 klp	25 klp	6 klp	6 klp	23 klp	25 klp	Belum Tercapai
	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB			37.262 aks	37.796 aks	38.331 aks	38.866 aks	39.012 aks	39.745 aks	38.331 aks	38.866 aks	Sudah Tercapai
	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri			44 klp	45 klp	46 klp	47 klp	39 klp	39 klp	46 klp	47 klp	Belum Tercapai
10	Persentase PPKBD Mandiri			46,41%	54,10%	61,79%	69,49%	39,23%	47,44%	61,79%	69,49%	Belum Tercapai
	1 Jumlah PPKBD Mandiri			181 org	211 org	241 org	271 org	153 org	185 orang	241 org	271 org	Belum Tercapai
	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik			290 org	295 org	300 org	305 org	150 org	186 orang	300 org	305 org	Belum Tercapai
	3 Jumlah PPKBD Aktif			390 org	390 org	390 org	390 org	390 org	390 orang	390 org	390 org	Sudah Tercapai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang merupakan sebuah wilayah terluas ke dua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Letak geografis Kabupaten Malang berada di bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga wilayah tersebut tergolong sangat strategis, karena berada pada pertemuan Kabupaten Pasuruan, Kediri, Blitar dan Lumajang. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Malang, sebagian besar wilayah merupakan kawasan perdesaan, dengan budaya masyarakat tradisional dan paternalistik.

Berdasarkan kondisi demografi, Kabupaten Malang merupakan wilayah berpenduduk terbesar ke dua di Jawa Timur (2.560.675 Jiwa) setelah kota Surabaya (Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2016), sehingga berimplikasi pada kompleksnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Malang.

Jika ditinjau dari luas wilayah, jumlah penduduk dan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Malang, maka pengelolaan Program KKB harus dilaksanakan berdasarkan segmentasi sasaran, hal ini bertujuan agar pengelolaan program KKB lebih selaras dan tepat sasaran. Upaya tersebut bisa dilaksanakan, jika terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diimbangi dengan SDM pengelola program KKB yang responsif dan handal.

Pengelolaan program KKB di Kabupaten Malang bukanlah perkara mudah, hal ini disadari begitu kompleksnya permasalahan yang muncul, sekaligus menjadi penghambat capaian Visi dan Misi Kabupaten Malang **“MADEP MANTEB MANETEP”**, serta pencapaian program nasional yang tertuang dalam SPM dan SDGs. Dampak dari kondisi tersebut, adalah:

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah.

Dengan rendahnya kualitas data basis kependudukan dan keluarga, akan berdampak sulitnya dalam memetakan sasaran, sehingga pembinaan program KKBPK menjadi tidak tepat sasaran.

2. Tingginya angka Drop Out KB akibat masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Tingginya angka Drop Out KB, akan berdampak pada menurunnya kepesertaan KB, meningkatkan LPP dan TFR. Penyebab utama kondisi tersebut adalah masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

3. Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun).

Perkawinan usia muda mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, hal ini disebabkan masa subur pada usia < 20 tahun lebih panjang, sehingga peluang mempunyai anak menjadi lebih besar.

4. Kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) masih rendah.

Sebagai dampak rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan KKBPK, adalah menurunnya kapasitas pembinaan program KKB. Hal ini mengingat bahwa masyarakatlah yang menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan KKBPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka program kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan secara beriringan/sejalan.

Peningkatan kuantitas dan kualitas IMP mutlak diperlukan, sebab IMP merupakan wahana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang langsung berhadapan dengan masyarakat, pada sisi lain untuk menyikapi keterbatasan tenaga PKB/PLKB di lapangan.

5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS masih rendah.

Rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL) dan UPPKS, akan berdampak pada menurunnya pembinaan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi keluarga.

Peningkatan kuantitas dan kualitas ketahanan keluarga, merupakan bagian dari upaya peningkatan sumberdaya manusia berkualitas, yang diwujudkan melalui media kelompok bina keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun pada kenyataannya, bahwa kualitas beberapa kelompok bina keluarga dan UPPKS masih belum sesuai harapan.

Beberapa permasalahan tersebut di atas perlu segera diatasi, dengan memfokuskan program dan kegiatan pada upaya-upaya pemecahan masalah pembangunan KKBPK, sekaligus sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan” (**MADEP MANTEB MANETEP**). Sebagai penjabaran Visi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Misi ke 3 yaitu “Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) merupakan bagian dari upaya pokok dalam pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekaligus sebagai bagian integral pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 (Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025) tentang Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa BKKBN yang awalnya hanya menangani program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Nasional, saat ini lebih dipertegas fungsinya dalam menjalankan kebijakan kependudukan, baik dari segi kuantitas, kualitas dan mobilitas. Penanganan permasalahan kependudukan tidak mungkin mampu diselesaikan secara spasial, namun diperlukan keterlibatan berbagai sektor terkait, dengan meningkatkan sinergi dan integrasi antar program. Menyikapi kondisi tersebut, maka sangat diperlukan komitmen *stakeholders*, agar pelaksanaan pembangunan KKBPK dapat tercapai sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan terus berusaha melakukan optimalisasi, dengan memanfaatkan sumberdaya eksisting yang dimiliki, berlandaskan pembangunan berpusat pada kepentingan dan kebutuhan, hajat hidup masyarakat (*People Centered*

Development), yang dikelola secara partisipatif bersama pemerintah, masyarakat dan swasta (NGO) melalui prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Beberapa pola seperti inilah yang relevan untuk diterapkan dan mampu mengakomodir berbagai permasalahan di masyarakat (khususnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), apalagi kondisi SDM lini lapangan yang semakin berkurang. Sebagai sasaran jangka panjang diharapkan masyarakatlah sebagai ujung tombak penggerakan Program KKB.

Berdasarkan data Tahun 2018, sumberdaya manusia eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, terdiri dari: 1) PPKBD = 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) orang; 2) Sub PPKBD = 3.661 (Tiga Ribu Enam Ratu Enam Puluh Satu) orang; 3) TOMA dan TOGA sejumlah 780 (Tujuh Ratus Delapan Puluh) orang. Namun jika ditinjau dari segi partisipasi swasta dalam penggerakan Program KKB di Kabupaten Malang, masih tergolong kecil kontribusinya dan masih terbatas pada pelayanan KB (Klinik Swasta = 36 (Tiga Puluh Enam) klinik, Dokter Praktek Swasta = 78 (Tujuh Puluh Delapan) orang, Bidan Praktek Swasta = 324 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat) orang), sedangkan partisipasi untuk kegiatan KIE masih sangat kurang. Partisipasi swasta perlu terus dibangun, sehingga tidak terbatas hanya pada pelayanan KB saja, namun juga berpartisipasi dalam kegiatan KIE Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di masyarakat.

Tantangan dan Peluang

a) TANTANGAN

1. Tingginya *Unmet Need*, yang disebabkan oleh tingginya perkawinan usia muda (< 20 tahun bagi wanita); rendahnya kesertaan ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), rendahnya kesertaan KB Pria dan tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB;
2. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif terhadap masyarakat melalui berbagai media, yang berdampak pada terhambatnya keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
3. Masih tingginya jumlah Keluarga Pra Sejahtera.
4. Rendahnya kualitas IMP akibat sering terjadi pergantian PPKBD dan Sub PPKBD dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

b) PELUANG

1. Adanya Sumberdaya Manusia eksternal pengelola Program KKB (PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai;
2. Tersedianya tenaga dan tempat pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Semakin meningkatnya komitmen stakeholder, baik dari pemerintah dan swasta.

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah, disebabkan:
 - Rendahnya kualitas SDM pengelola pencatatan pelaporan, menurunnya frekuensi pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Masih rendahnya peserta KB MKJP, disebabkan:
 - Terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan KB Non MKJP dengan berbagai alasan baik bersifat medis dan non medis, berkurangnya KIE dan konseling KB MKJP.
3. Masih tingginya Perkawinan usia muda, disebabkan:
 - Masih adanya pandangan tradisional di masyarakat untuk kawin muda, derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media (khususnya melalui media internet), masih kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi.
4. Masih rendahnya kualitas IMP (PPKBD & Sub PPKBD), disebabkan:
 - Munculnya pandangan bahwa program KKB merupakan urusan perempuan, sering terjadinya pergantian anggota IMP, rendahnya kualitas SDM IMP karena banyak yang berusia lanjut, menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan akibat berkurangnya tenaga PKB/PLKB.
5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) rendah, disebabkan:
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pengelola kegiatan Bina Keluarga dan menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan.

Beberapa hal sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap tantangan dan peluang yang ada, yaitu:

1. Perlunya peningkatan pembinaan administrasi pencatatan dan pelaporan secara berkesinambungan, sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi secara periodik.

2. Perlunya peningkatan kapasitas pembinaan dan pelayanan kepesertaan ber KB untuk diarahkan menjadi peserta KB MKJP, yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, khususnya bagi peserta KB Non MKJP. Hal ini disebabkan bahwa metode KB Non MKJP sangat rawan terjadinya kegagalan (kehamilan), yang berakibat meningkatnya angka Drop Out (putus menjadi peserta KB).
3. Peningkatan pembinaan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KKBPK, yang dilaksanakan melalui pembinaan secara rutin dan berkesinambungan.
5. Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 belum diterbitkan, sehingga belum bisa dilakukan analisa.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN MALANG

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA						
2.208.13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14.311.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					14.311.200.000,00
2.208.13.01	Program Pelayanan Administrasi		Persentase Pemenuhan Operasional		100 %	1.077.099.000,00	Program Pelayanan Administrasi		Persentase Pemenuhan Operasional		100 %	1.077.099.000,00
2.208.13.01.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.000 buah	22.400.000,00	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB	1 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4.000 buah	22.400.000,00		
2.208.13.01.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	26.950.000,00	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKB	2 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	26.950.000,00		
2.208.13.01.03	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 ob	434.250.000,00	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	3 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 ob	434.250.000,00		
2.208.13.01.04	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	4 Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	33.550.000,00	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	4 Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	33.550.000,00		
2.208.13.01.05	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	51.300.000,00	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKB	5 Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	51.300.000,00		
2.208.13.01.06	6 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	DPPKB	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 jenis	30.250.000,00	6 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	DPPKB	6 Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 jenis	30.250.000,00		
2.208.13.01.07	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 jenis	8.250.000,00	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB	7 Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 jenis	8.250.000,00		
2.208.13.01.08	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	4.750.000,00	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPKB	8 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	4.750.000,00		
2.208.13.01.09	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2.400 hok	62.350.000,00	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKB	9 Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2.400 hok	62.350.000,00		
2.208.13.01.10	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	125 hok	73.100.000,00	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	10 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	125 hok	73.100.000,00		
2.208.13.01.11	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	160 hok	157.000.000,00	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPPKB	11 Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	160 hok	157.000.000,00		
2.208.13.01.12	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	29 kec	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	12 bulan	172.949.000,00	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	29 kec	12 Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	12 bulan	172.949.000,00		
2.208.13.02	Program Peningkatan Sarana dan		Persentase Pemenuhan Sarana dan		100 %	604.742.000,00	Program Peningkatan Sarana dan		Persentase Pemenuhan Sarana dan		100 %	604.742.000,00
2.208.13.02.01	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKB	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	33.550.000,00	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKB	1 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	33.550.000,00		
2.208.13.02.02	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKB	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	134.750.000,00	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKB	2 Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	134.750.000,00		
2.208.13.02.03	3 Pengadaan Mebeleur	DPPKB	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	16.500.000,00	3 Pengadaan Mebeleur	DPPKB	3 Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	16.500.000,00		
2.208.13.02.04	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKB	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	9.850.000,00	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKB	4 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	9.850.000,00		
2.208.13.02.05	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149 unit	76.550.000,00	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	5 Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149 unit	76.550.000,00		
2.208.13.02.06	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	29 kec	6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 gedung	120.242.000,00	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	29 kec	6 Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 gedung	120.242.000,00		
2.208.13.02.07	7 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	2 kec	7 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	2 unit	213.300.000,00	7 Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	2 kec	7 Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	2 unit	213.300.000,00		
2.208.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur		100 %	13.550.000,00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Penunjang Kerja Aparatur		100 %	13.550.000,00
2.208.13.03.01	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPPKB	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	50 stel	13.550.000,00	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPPKB	1 Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	50 stel	13.550.000,00		

No	Rancangan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.208.13.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber		Persentase Peningkatan Kapasitas	100 %	17.450.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber		Persentase Peningkatan Kapasitas	100 %	17.450.000,00	
2.208.13.04.01	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPPKB	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100 orang	17.450.000,00	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPPKB	1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100 orang	17.450.000,00	
2.208.13.05	Program Peningkatan Pengembangan		Persentase Dokumen Perencanaan,	100 %	16.650.000,00	Program Peningkatan Pengembangan		Persentase Dokumen Perencanaan,	100 %	16.650.000,00	
2.208.13.05.01	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	11.000.000,00	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB	1 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	11.000.000,00	
2.208.13.05.02	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPPKB	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	2.800.000,00	2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPPKB	2 Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	2.800.000,00	
2.208.13.05.03	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPPKB	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	2.850.000,00	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPPKB	3 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	2.850.000,00	
2.208.13.06	Program Data/Informasi Pengendalian		Persentase data keluarga dan KB di	100 %	2.237.541.000,00	Program Data/Informasi Pengendalian		Persentase data keluarga dan KB di	100 %	2.237.541.000,00	
2.208.13.06.01	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	390 Des/Kel	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/keurahan	390 dokumen	54.200.000,00	1 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	390 Des/Kel	1 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/keurahan	390 dokumen	54.200.000,00	
2.208.13.06.02	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	33 kec	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	30.550.000,00	2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	33 kec	2 Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	30.550.000,00	
2.208.13.06.03	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	33 kec	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	33.700.000,00	3 Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	33 kec	3 Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	33.700.000,00	
2.208.13.06.04	4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	DPPKB	4 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	64.650.000,00	4 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	DPPKB	4 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	64.650.000,00	
2.208.13.06.05	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	DPPKB	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	69.800.000,00	5 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	DPPKB	5 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	69.800.000,00	
2.208.13.06.06	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	390 Des/Kel	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/keurahan	390 dokumen	1.469.808.000,00	6 Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	390 Des/Kel	6 Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/keurahan	390 dokumen	1.469.808.000,00	
2.208.13.06.07	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	DPPKB	7 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	454.884.000,00	7 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	DPPKB	7 Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	454.884.000,00	
2.208.13.06.08	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	DPPKB	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	59.949.000,00	8 Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	DPPKB	8 Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	59.949.000,00	
2.208.13.07	Program Pelayanan Keluarga Berencana		Persentase Peserta KB MKJP	40,00 %	1.042.713.000,00	Program Pelayanan Keluarga Berencana		Persentase Peserta KB MKJP	40,00 %	1.042.713.000,00	
2.208.13.07.01	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	33 kec	1 Jumlah peserta KB Aktif	329.294 akseptor	125.900.000,00	1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	33 kec	1 Jumlah peserta KB Aktif	329.294 akseptor	125.900.000,00	
2.208.13.07.02	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	33 kec	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3.400 orang	33.450.000,00	2 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	33 kec	2 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3.400 orang	33.450.000,00	
2.208.13.07.03	3 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	33 kec	3 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	80.050.000,00	3 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	33 kec	3 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	80.050.000,00	
2.208.13.07.04	4 Pembinaan Kesertaan ber KB	96 klinik	4 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	36.979 PUS	80.050.000,00	4 Pembinaan Kesertaan ber KB	96 klinik	4 Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	36.979 PUS	80.050.000,00	
2.208.13.07.05	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	33 kec	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR) (DAK)	3.400 orang	177.549.000,00	5 Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	33 kec	5 Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR) (DAK)	3.400 orang	177.549.000,00	
2.208.13.07.06	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	96 klinik	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	545.714.000,00	6 Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	96 klinik	6 Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	545.714.000,00	
2.208.13.08	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase BKR Paripurna	54,72 %	2.755.430.000,00	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase BKR Paripurna	54,72 %	2.755.430.000,00	
			Persentase PUS anggota kelompok BKB	88,00 %				Persentase PUS anggota kelompok BKB	88,00 %		
			Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	46,46 %				Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	46,46 %		
2.208.13.08.01	1 Bina Ketahanan Remaja	33 kec	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	23 kelompok	106.700.000,00	1 Bina Ketahanan Remaja	33 kec	1 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	23 kelompok	106.700.000,00	
2.208.13.08.02	2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	33 kec	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.331 akseptor	106.500.000,00	2 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	33 kec	2 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.331 akseptor	106.500.000,00	
2.208.13.08.03	3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	33 kec	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	46 kelompok	187.000.000,00	3 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	33 kec	3 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	46 kelompok	187.000.000,00	
2.208.13.08.04	4 Bina Ketahanan Remaja (DAK)	21 kec	4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	23 kelompok	783.329.000,00	4 Bina Ketahanan Remaja (DAK)	21 kec	4 Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	23 kelompok	783.329.000,00	
2.208.13.08.05	5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	33 kec	5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.331 akseptor	1.447.989.000,00	5 Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	33 kec	5 Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38.331 akseptor	1.447.989.000,00	
2.208.13.08.06	6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	33 kec	6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	46 kelompok	123.912.000,00	6 Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	33 kec	6 Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	46 kelompok	123.912.000,00	

No	Rancangan RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.208.13.09	Program Penyuluhan dan Penggerakan		Persentase PPKBD Mandiri	61,79 %	6.546.025.000,00	Program Penyuluhan dan Penggerakan		Persentase PPKBD Mandiri	61,79 %	6.546.025.000,00	
2.208.13.09.01	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	33 kec	1 Jumlah PPKBD Mandiri	241 orang	106.500.000,00	1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	33 kec	1 Jumlah PPKBD Mandiri	241 orang	106.500.000,00	
2.208.13.09.02	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	33 kec	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	300 orang	300.100.000,00	2 Komunikasi Informasi Edukasi Massa	33 kec	2 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	300 orang	300.100.000,00	
2.208.13.09.03	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	33 kec	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	79.900.000,00	3 Penyuluhan Program Keluarga Berencana	33 kec	3 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	79.900.000,00	
2.208.13.09.04	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	33 kec	4 Jumlah PPKBD Mandiri	241 orang	4.247.134.000,00	4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	33 kec	4 Jumlah PPKBD Mandiri	241 orang	4.247.134.000,00	
2.208.13.09.05	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	33 kec	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	300 orang	433.008.000,00	5 Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	33 kec	5 Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	300 orang	433.008.000,00	
2.208.13.09.06	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	33 kec	6 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	1.379.383.000,00	6 Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	33 kec	6 Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	1.379.383.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan permasalahan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dilaksanakan melalui media MUSRENBANG, dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Berbagai usulan masyarakat yang terhimpun, dijadikan sebagai bahan analisa dan sebagai program prioritas pembangunan program KKB. Mekanisme penjaringan usulan masyarakat, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga pada tingkat kabupaten, yang dihadiri oleh perwakilan berbagai elemen masyarakat, antara lain: (1) Kelompok Keluarga Miskin; (2) Kelompok Perempuan; (3) Kelompok Pemuda; (4) Toka dan Toka; (5) Kader KB dan Kesehatan; (6) Kelompok Tani; (7) Kelompok Wirausaha; (8) LSM dan LSOM; (9) Kelompok profesi yang lain.

Proses pengumpulan usulan masyarakat dimulai dari tingkat paling dasar, yang diawali dari forum-forum tingkat RT. Untuk selanjutnya, usulan tersebut diajukan pada Musrenbang tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga pada Musrenbang tingkat kabupaten yang dikemas dalam aplikasi Musrenbang. Hasil Musrenbang tersebut, selanjutnya dipilah-pilah dan diformulasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dijadikan program prioritas.

Berdasarkan data yang terkumpul dalam aplikasi Musrenbang kabupaten Tahun 2020, tidak muncul usulan program KKB dari masyarakat. Namun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya tergantung pada aplikasi tersebut, namun penjaringan permasalahan juga diambil dari forum konsultasi PPLKB (Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Berbagai isu-isu setrategis Program KKB, yaitu: (1) Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun); (2) Masih tingginya Drop Out KB; (3) masih rendahnya kualitas Institusi Masyarakat Perdesaan (PPKBD dan Sub PPKBD); (4) Masih rendahnya kualitas kegiatan kelompok Tri Bina Keluarga (BKB, BKR dan BKL); (5) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS. Kelima permasalahan itulah yang selama ini menjadi penghambat, sekaligus sebagai tantangan pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Tabel 2.4

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020**

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, didasarkan pada filosofi penggerakan peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana, melalui strategi: (1) *Re-Establishment* yaitu dengan membangun kembali sendi-sendi Program KB Nasional sampai ke tingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan; (2) *Sustainability* yaitu dengan memantapkan komitmen program yang berkesinambungan, yang didukung oleh segenap stakeholders, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Adapun tujuan nasional yang ingin dicapai, adalah: (1) Keluarga dengan jumlah anak ideal; (2) Keluarga sehat; (3) Keluarga berpendidikan; (4) Keluarga Sejahtera; (5) Keluarga Berketahanan; (6) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya; (7) Penduduk tumbuh seimbang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, secara umum adalah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kelahiran. Sedangkan tujuan khusus dari Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, adalah “Menekan laju pertumbuhan penduduk”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, adalah “Meningkatnya kepesertaan ber KB”.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja Tahun 2020 lebih diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggerakan program KKB, dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan program KKB. Sebagai

penopang tujuan tersebut, implementasi kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan mengalokasikan anggaran program/kegiatan secara tepat dan proporsional, berdasarkan tingkat prioritas permasalahan yang sedang dihadapi, sekaligus juga mempertimbangkan kebutuhan kegiatan Pengarus Utamaan Gender (PUG), yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Program Pelayanan Keluarga Berencana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi;
 - b) Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR);
 - c) Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - d) Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi.
3. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB;
 - b) Komunikasi Informasi Edukasi Massa;
 - c) Penyuluhan Program Keluarga Berencana.
4. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Bina Ketahanan Remaja;
 - b) Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c) Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2.208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2.208.13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.311.200.000,00				17.926.450.000,00
2.208.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.077.099.000,00			100%	1.161.250.000,00
2.208.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Sekretariat	4000 buah	22.400.000,00	APBD Kabupaten		4000 buah	24.000.000,00
2.208.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Sekretariat	12 bulan	26.950.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	29.650.000,00
2.208.13.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Sekretariat	12 ob	434.250.000,00	APBD Kabupaten		12 ob	464.650.000,00
2.208.13.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Sekretariat	12 ob	33.550.000,00	APBD Kabupaten		12 ob	36.950.000,00
2.208.13.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Sekretariat	32 jenis	51.300.000,00	APBD Kabupaten		32 jenis	56.400.000,00
2.208.13.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Sekretariat	6 jenis	30.250.000,00	APBD Kabupaten		6 jenis	33.300.000,00
2.208.13.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Sekretariat	10 jenis	8.250.000,00	APBD Kabupaten		10 jenis	9.100.000,00
2.208.13.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Sekretariat	3 jenis	4.750.000,00	APBD Kabupaten		3 jenis	5.100.000,00
2.208.13.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Sekretariat	2400 hok	62.350.000,00	APBD Kabupaten		2400 hok	66.750.000,00
2.208.13.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Sekretariat	125 hok	73.100.000,00	APBD Kabupaten		125 hok	78.250.000,00
2.208.13.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Sekretariat	160 hok	157.000.000,00	APBD Kabupaten		160 hok	168.000.000,00
2.208.13.01.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	Sekretariat	12 bulan	172.949.000,00	DAK		12 bulan	189.100.000,00
2.208.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	604.742.000,00			100%	2.227.300.000,00
2.208.13.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Sekretariat	3 jenis	33.550.000,00	APBD Kabupaten		3 jenis	36.950.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.208.13.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Sekretariat	7 jenis	134.750.000,00	APBD Kabupaten		7 jenis	148.250.000,00
2.208.13.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Sekretariat	2 jenis	16.500.000,00	APBD Kabupaten		2 jenis	18.150.000,00
2.208.13.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Sekretariat	1 gedung	9.850.000,00	APBD Kabupaten		1 gedung	10.550.000,00
2.208.13.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Sekretariat	149 unit	76.550.000,00	APBD Kabupaten		149 unit	81.950.000,00
2.208.13.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	Sekretariat	29 gedung	120.242.000,00	DAK		33 gedung	131.450.000,00
2.208.13.02.07	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	Sekretariat	2 unit	213.300.000,00	DAK		4 unit	1.800.000.000,00
2.208.13.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	13.550.000,00			100%	14.500.000,00
2.208.13.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Sekretariat	50 stel	13.550.000,00	APBD Kabupaten		50 stel	14.500.000,00
2.208.13.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	17.450.000,00			100%	18.700.000,00
2.208.13.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Sekretariat	100 orang	17.450.000,00	APBD Kabupaten		100 orang	18.700.000,00
2.208.13.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	16.650.000,00			100%	18.050.000,00
2.208.13.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Sekretariat	4 buku	11.000.000,00	APBD Kabupaten		4 buku	12.000.000,00
2.208.13.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Sekretariat	1 buku	2.800.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	3.000.000,00
2.208.13.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Sekretariat	1 buku	2.850.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	3.050.000,00
2.208.13.06	PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan		100%	2.237.541.000,00			100%	2.887.150.000,00
2.208.13.06.01	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	Bidang Pengendalian Penduduk	390 dokumen	54.200.000,00	APBD Kabupaten		390 dokumen	58.000.000,00
2.208.13.06.02	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	30.550.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	32.700.000,00
2.208.13.06.03	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	33.700.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	36.100.000,00
2.208.13.06.04	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	64.650.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	69.200.000,00
2.208.13.06.05	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	69.800.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	74.700.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.208.13.06.06	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	Bidang Pengendalian Penduduk	390 dokumen	1.469.808.000,00	DAK		390 dokumen	2.053.700.000,00
2.208.13.06.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	454.884.000,00	DAK		1 dokumen	497.250.000,00
2.208.13.06.08	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	59.949.000,00	DAK		1 dokumen	65.500.000,00
2.208.13.07	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)		89.47 %	1.042.713.000,00			100%	1.137.300.000,00
		Persentase Peserta KB MKJP		40.00 %				40.00 %	
2.208.13.07.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	Bidang Keluarga Berencana	329294 akseptor	125.900.000,00	APBD Kabupaten		343625 akseptor	134.750.000,00
2.208.13.07.02	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	Bidang Keluarga Berencana	3400 orang	33.450.000,00	APBD Kabupaten		3800 orang	35.800.000,00
2.208.13.07.03	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	Bidang Keluarga Berencana	96 klinik	80.050.000,00	APBD Kabupaten		96 klinik	88.050.000,00
2.208.13.07.04	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	Bidang Keluarga Berencana	36979 PUS	80.050.000,00	APBD Kabupaten		34181 PUS	88.050.000,00
2.208.13.07.05	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	Bidang Keluarga Berencana	3400 orang	177.549.000,00	DAK		3800 orang	194.050.000,00
2.208.13.07.06	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	Bidang Keluarga Berencana	96 klinik	545.714.000,00	DAK		96 klinik	596.600.000,00
2.208.13.08	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase BKR Paripurna		54.72 %	2.755.430.000,00			62.26 %	3.302.800.000,00
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri		46.46 %				47.47 %	
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB		88.00 %				88.15 %	
2.208.13.08.01	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23 kelompok	106.700.000,00	APBD Kabupaten		25 kelompok	117.400.000,00
2.208.13.08.02	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38331 akseptor	106.500.000,00	APBD Kabupaten		38866 akseptor	117.150.000,00
2.208.13.08.03	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	46 kelompok	187.000.000,00	APBD Kabupaten		47 kelompok	205.050.000,00
2.208.13.08.04	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23 kelompok	783.329.000,00	DAK		25 kelompok	1.161.300.000,00
2.208.13.08.05	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38331 akseptor	1.447.989.000,00	DAK		38866 akseptor	1.566.450.000,00
2.208.13.08.06	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	46 kelompok	123.912.000,00	DAK		47 kelompok	135.450.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.208.13.09	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PPKBD Mandiri		61.79 %	6.546.025.000,00			69.49 %	7.159.400.000,00
2.208.13.09.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	241 orang	106.500.000,00	APBD Kabupaten		271 orang	117.150.000,00
2.208.13.09.02	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	300 orang	300.100.000,00	APBD Kabupaten		305 orang	330.100.000,00
2.208.13.09.03	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	390 orang	79.900.000,00	APBD Kabupaten		390 orang	87.850.000,00
2.208.13.09.04	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	241 orang	4.247.134.000,00	DAK		271 orang	4.643.000.000,00
2.208.13.09.05	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	300 orang	433.008.000,00	DAK		305 orang	473.350.000,00
2.208.13.09.06	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	390 orang	1.379.383.000,00	DAK		390 orang	1.507.950.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, didasarkan pada prioritas kebutuhan yang dialokasikan secara proporsional pada setiap program/kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (7,53%)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22.400.000,00 (0,16%);
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp26.950.000,00 (0,19%);
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp434.250.000,00 (3,03%);
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.550.000,00 (0,23%);
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp51.300.000,00 (0,36%);
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30.250.000,00 (0,21%);
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.250.000,00 (0,06%);
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.750.000,00 (0,03%);
9. Penyediaan Makanan dan Minuman, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp62.350.000,00 (0,44%);
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp73.100.000,00 (0,51%);
11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp157.000.000,00 (1,10%); dan
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp172.949.000,00 (1,21%)

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4,23%)

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.550.000,00 (0,23%);

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp134.750.000,00 (0,94%);
3. Pengadaan Mebeleur, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.500.000,00 (0,12%);
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.850.000,00 (0,07%);
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp76.550.000,00 (0,53%);
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp120.242.000,00 (0,84%); dan
7. Pembangunan Gedung Kantor (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp213.300.000,00 (1,49%).

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (0,09%)

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.550.000,00 (0,09%).

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (0,12%)

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17.450.000,00 (0,12%).

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (0,12%)

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.000.000,00 (0,08%);
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.800.000,00 (0,02%);
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.850.000,00 (0,02%).

F. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk (15,63%)

1. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp54.200.000,00 (0,38%);
2. Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30.550.000,00 (0,21%);
3. Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.700.000,00 (0,24%);

4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp64.650.000,00 (0,45%);
5. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp69.800.000,00 (0,49%);
6. Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.469.808.000,00 (10,27%);
7. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp454.884.000,00 (3,18%);
8. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp59.949.000,00 (0,42%).

G. Program Pelayanan Keluarga Berencana (7,29%)

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp125.900.000,00 (0,88%);
2. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.450.000,00 (0,23%);
3. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.050.000,00 (0,56%);
4. Pembinaan Kesertaan Ber-KB, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.050.000,00 (0,56%);
5. Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp177.549.000,00 (1,24%);
6. Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp545.714.000,00 (3,81%).

H. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga (19,25%)

1. Bina Ketahanan Remaja, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp106.700.000,00 (0,75%);
2. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp106.500.000,00 (0,74%);
3. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp187.000.000,00 (1,31%);
4. Bina Ketahanan Remaja (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp783.329.000,00 (5,47%);
5. Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.447.989.000,00 (10,12%);

6. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp123.912.000,00 (0,87%).

I. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana (45,74%)

1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp106.500.000,00 (0,74%);
2. Komunikasi Informasi Edukasi Massa, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp300.100.000,00 (2,10%);
3. Penyuluhan Program Keluarga Berencana, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp79.900.000,00 (0,56%);
4. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.247.134.000,00 (29,68%);
5. Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp433.008.000,00 (3,03%);
6. Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.379.383.000,00 (9,64%).

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					14.311.200.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.311.200.000,00		
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				14.311.200.000,00		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.311.200.000,00		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.077.099.000,00		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Sekretariat	4000 buah	22.400.000,00	APBD Kabupaten	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Sekretariat	12 bulan	26.950.000,00	APBD Kabupaten	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Sekretariat	12 ob	434.250.000,00	APBD Kabupaten	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Sekretariat	12 ob	33.550.000,00	APBD Kabupaten	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Sekretariat	32 jenis	51.300.000,00	APBD Kabupaten	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Sekretariat	6 jenis	30.250.000,00	APBD Kabupaten	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Sekretariat	10 jenis	8.250.000,00	APBD Kabupaten	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Sekretariat	3 jenis	4.750.000,00	APBD Kabupaten	
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Sekretariat	2400 hok	62.350.000,00	APBD Kabupaten	
	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Sekretariat	125 hok	73.100.000,00	APBD Kabupaten	
	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Sekretariat	160 hok	157.000.000,00	APBD Kabupaten	
	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	Sekretariat	12 bulan	172.949.000,00	DAK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	604.742.000,00		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Sekretariat	3 jenis	33.550.000,00	APBD Kabupaten	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Sekretariat	7 jenis	134.750.000,00	APBD Kabupaten	
3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	Sekretariat	2 jenis	16.500.000,00	APBD Kabupaten	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Sekretariat	1 gedung	9.850.000,00	APBD Kabupaten	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Sekretariat	149 unit	76.550.000,00	APBD Kabupaten	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	Sekretariat	29 gedung	120.242.000,00	DAK	
7	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	Sekretariat	2 unit	213.300.000,00	DAK	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	13.550.000,00		
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Sekretariat	50 stel	13.550.000,00	APBD Kabupaten	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	17.450.000,00		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Sekretariat	100 orang	17.450.000,00	APBD Kabupaten	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	16.650.000,00		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Sekretariat	4 buku	11.000.000,00	APBD Kabupaten	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Sekretariat	1 buku	2.800.000,00	APBD Kabupaten	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Sekretariat	1 buku	2.850.000,00	APBD Kabupaten	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan		100%	2.237.541.000,00		
1	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	Bidang Pengendalian Penduduk	390 dokumen	54.200.000,00	APBD Kabupaten	
2	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	30.550.000,00	APBD Kabupaten	
3	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	33.700.000,00	APBD Kabupaten	
4	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	64.650.000,00	APBD Kabupaten	
5	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	69.800.000,00	APBD Kabupaten	
6	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	Bidang Pengendalian Penduduk	390 dokumen	1.469.808.000,00	DAK	
7	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	454.884.000,00	DAK	
8	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk	1 dokumen	59.949.000,00	DAK	
7	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)		89.47 %	1.042.713.000,00		
		Persentase Peserta KB MKJP		40.00 %			
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	Bidang Keluarga Berencana	329294 akseptor	125.900.000,00	APBD Kabupaten	
2	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	Bidang Keluarga Berencana	3400 orang	33.450.000,00	APBD Kabupaten	
3	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	Bidang Keluarga Berencana	96 klinik	80.050.000,00	APBD Kabupaten	
4	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	Bidang Keluarga Berencana	36979 PUS	80.050.000,00	APBD Kabupaten	
5	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	Bidang Keluarga Berencana	3400 orang	177.549.000,00	DAK	
6	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	Bidang Keluarga Berencana	96 klinik	545.714.000,00	DAK	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
1	2	3	4	5	6	7	8		
8	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase BKR Paripurna		54.72 %	2.755.430.000,00				
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri		46.46 %					
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB		88.00 %					
	1	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23 kelompok	106.700.000,00	APBD Kabupaten		
	2	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38331 akseptor	106.500.000,00	APBD Kabupaten		
	3	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	46 kelompok	187.000.000,00	APBD Kabupaten		
	4	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	23 kelompok	783.329.000,00	DAK		
5	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38331 akseptor	1.447.989.000,00	DAK			
6	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	46 kelompok	123.912.000,00	DAK			
9	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PPKBD Mandiri		61.79 %	6.546.025.000,00				
		1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	241 orang	106.500.000,00	APBD Kabupaten	
		2	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	300 orang	300.100.000,00	APBD Kabupaten	
		3	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	390 orang	79.900.000,00	APBD Kabupaten	
		4	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	241 orang	4.247.134.000,00	DAK	
		5	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	300 orang	433.008.000,00	DAK	
		6	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	390 orang	1.379.383.000,00	DAK	

Berdasarkan proporsi alokasi anggaran pada setiap program/kegiatan (tabel 4.1), diharapkan mampu menunjang pencapaian target sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang diukur berdasarkan pada ketiga target indikator kinerja sasaran, yaitu :

- | | |
|---|--------|
| 1. Persentase Peserta KB Aktif | 68,94% |
| 2. Persentase Kampung KB Aktif | 50,00% |
| 3. Persentase Kelompok PIK Remaja tegar | 23,96% |

Adapun penjabaran target program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 pertribulan secara terperinci dijelaskan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

**TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	Target Capaian per Triwulan Tahun 2020				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	15,00 %	40,00 %	70,00 %	100,00 %	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4000 buah	30,00 %	50,00 %	80,00 %	100,00 %	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 ob	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	6 jenis	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 jenis	15,00 %	40,00 %	65,00 %	100,00 %	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2400 hok	15,00 %	45,00 %	80,00 %	100,00 %	
	10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	125 hok	15,00 %	45,00 %	70,00 %	100,00 %	
	11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	160 hok	15,00 %	45,00 %	70,00 %	100,00 %	
	12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	12 bulan	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	Target Capaian per Triwulan Tahun 2020				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	5,00 %	10,00 %	25,00 %	100,00 %	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	3 jenis	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149 unit	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 gedung	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
7	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	2 unit	0,00 %	0,00 %	90,00 %	100,00 %	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	50 stel	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	100 orang	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	0,00 %	0,00 %	60,00 %	100,00 %	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	0,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	Target Capaian per Triwulan Tahun 2020				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%	0,00 %	35,00 %	70,00 %	100,00 %	
1	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	0,00 %	35,00 %	70,00 %	100,00 %	
2	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
3	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
4	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
5	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
6	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	0,00 %	35,00 %	70,00 %	100,00 %	
7	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
8	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	
7	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	89,47%	62,00 %	72,00 %	90,00 %	100,00 %	
		Persentase Peserta KB MKJP	40,00%	80,00 %	87,50 %	93,00 %	100,00 %	
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	329294 akseptor	90,00 %	92,50 %	95,00 %	100,00 %	
2	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3400 orang	58,00 %	67,00 %	88,00 %	100,00 %	
3	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	
4	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	36979 PUS	25,00 %	30,00 %	70,00 %	100,00 %	
5	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3400 orang	58,00 %	67,00 %	88,00 %	100,00 %	
6	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100,00 %	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	Target Capaian per Triwulan Tahun 2020				Keterangan	
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		Persentase BKR Paripurna	54,72%	82,75 %	88,00 %	93,00 %	100,00 %	
			Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	46,46%	77,00 %	84,00 %	91,00 %	100,00 %	
			Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88,00%	96,00 %	97,50 %	98,50 %	100,00 %	
	1	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	23 kelompok	26,00 %	52,00 %	78,00 %	100,00 %	
	2	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38331 akseptor	90,00 %	92,50 %	95,00 %	100,00 %	
	3	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	46 kelompok	85,00 %	90,00 %	95,00 %	100,00 %	
	4	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	23 kelompok	26,00 %	52,00 %	78,00 %	100,00 %	
9	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA		Persentase PPKBD Mandiri	61,79%	40,00 %	47,00 %	55,00 %	100,00 %	
	1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	241 orang	63,00 %	75,00 %	80,00 %	100,00 %	
	2	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	300 orang	50,00 %	70,00 %	80,00 %	100,00 %	
	3	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
	4	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	241 orang	63,00 %	75,00 %	80,00 %	100,00 %	
	5	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	300 orang	50,00 %	70,00 %	80,00 %	100,00 %	
6	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %		

Perincian target diatas berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian program/kegiatan Tahun 2018. Pada target program/kegiatan yang dilaksanakan pada tribulan III sampai dengan IV, dikarenakan:

1. Realisasi anggaran baru bisa dilaksanakan bulan April, sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan kegiatan;
2. Proses pengumpulan data, karena data yang disajikan mencangkup data selama tahun berjalan;
3. Penginputan pengadaan melalui Aplikasi SIRUP, dilaksanakan pada tahun berjalan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan diakhir tahun.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan mulai tribulan III sampai dengan IV, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Mebeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
 - a. Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)
 - b. Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)
 - c. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan
 - d. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 - e. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)
 - f. Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan perencanaan program atau kegiatan pada pelaksanaan tahun ke empat dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Berdasarkan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga terdapat beberapa upaya yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Peningkatan kualitas data kependudukan dan keluarga berencana;
2. Peningkatan kualitas data basis kependudukan dan keluarga berencana;
3. Pendewasaan Usia Perkawinan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Peningkatan dan pengembangan kegiatan ketahanan keluarga dan remaja, serta pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan perimbangan alokasi anggaran secara proporsional dan tepat sasaran, melalui pemanfaatan sumberdaya *existing* sebaik mungkin, sehingga mampu memberikan daya ungkit yang signifikan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Namun, untuk mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja pada tahun berikutnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, akan berupaya mengajukan tambahan anggaran pada setiap program atau kegiatan.

Demikian untuk dilaksanakan.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

Nomor: 050/4145/35.07.202/2019

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 telah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RKPD, dan RKPD;
- Kedua : Sistematisa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Kelima : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG


Dra. Sri Wahjuni Pudji Lestari
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198003 2 002

KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG


Ir. Tomie Herawanto, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004


**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

Dinas PD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang


NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI	
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
I PENDAHULUAN							
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	✓				
		Proses penyusunan Renja	✓				
		Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2019, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021	✓				
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	✓				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	✓				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	✓				
II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu							
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	✓				
		Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	✓				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :					
		1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	✓				
		2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	✓				
		3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;			✓		
		4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	✓				
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	✓						
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.	✓						
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	✓				
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	✓				
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	✓				
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	✓				
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	✓				
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	✓				
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan	✓				
		Alasan dan catatan penting perbedaan	✓				
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2020 (yang dilaksanakan di Tahun 2019)	✓				

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	√		
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	√		
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021	√		Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
4.1		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2020 berdasarkan RKPD 2020 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	√		
4.2	Rencana Anggaran Kas	Menguraikan tentang rencana kerja, pendanaan dan target penyerapan per triwulan	√		
V PENUTUP					
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	√		

Tim Penyusun Rencana Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Malang


DHESY BURT SUSILOWATI, S.Sos
Penata
NIP. 19851202 201001 2 017

Tim Verifikasi:

1. Nama : Haryati Andayani, SE, MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19720819 199703 2 006


2. Nama : Nanie F
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 1970330 200001 2 000
